

KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DAN PERANCIS DALAM MEMENUHI *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* (MEF) TAHUN 2019

Agus Sugesti Sulistyawan¹, Agus Subagyo², Yusep Ginanjar³

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
3. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The defense cooperation between Indonesia and France in 2019 was an integral part of Indonesia's efforts to achieve its Minimum Essential Force (MEF) target. MEF is a strategic concept aimed at building a minimal yet effective defense capability to safeguard national sovereignty and regional stability. In this context, France, as a nation with advanced defense technology, offered various forms of cooperation, such as arms procurement, technology transfer, and offsets. This cooperation involved not only the acquisition of Dassault Rafale fighter jets and Scorpène submarines but also the enhancement of Indonesia's defense industry capabilities through technology transfer. A deeper analysis shows that this partnership not only benefits Indonesia's defense modernization but also strengthens the diplomatic and geopolitical ties between the two countries, with France expanding its influence in the Indo-Pacific region.

Keywords: Defense cooperation, Minimum Essential Force and technology transfer

ABSTRAK

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis pada tahun 2019 menjadi bagian integral dari upaya Indonesia mencapai target *Minimum Essential Force* (MEF). MEF merupakan konsep strategis untuk membangun kekuatan pertahanan minimal yang mampu menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas regional. Dalam konteks ini, Prancis, sebagai salah satu negara dengan teknologi pertahanan maju, menawarkan berbagai bentuk kerjasama seperti pengadaan alutsista, transfer teknologi, dan offset. Kerjasama ini tidak hanya mencakup pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dan kapal selam Scorpène, tetapi juga melibatkan peningkatan kemampuan industri pertahanan Indonesia melalui transfer teknologi. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi modernisasi alutsista Indonesia, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan geopolitik kedua negara, dengan Prancis memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci: Kerjasama pertahanan, *Minimum Essential Force* dan transfer teknologi

PENDAHULUAN

Sejak 2010, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam konteks geopolitik yang dinamis, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut China Selatan, perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, serta semakin kompleksnya ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, *cyber warfare*, dan ancaman maritime. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan akses terhadap

teknologi militer canggih guna menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayahnya, terutama mengingat posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan global dan sebagai salah satu aktor kunci di ASEAN, Indonesia ingin mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan dan mencegah dominasi satu kekuatan tertentu (Kementerian Pertahanan RI, 2008).

Sebagai upaya dalam memperkuat postur pertahanannya, Indonesia perlu melakukan modernisasi alutsista, karena angkatan bersenjata Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa banyak peralatan militernya sudah usang dan tidak memadai untuk menghadapi ancaman modern. Indonesia memerlukan pesawat tempur multirole yang lebih canggih untuk menggantikan pesawat F-5 Tiger yang sudah tidak operasional, serta kapal selam yang lebih modern untuk meningkatkan kemampuan patroli dan pertahanan maritim di perairan strategisnya. Sebagai upaya dalam memperkuat postur pertahanan, Indonesia mencanangkan sebuah konsep pembangunan kekuatan pertahanan untuk memastikan Indonesia memiliki kekuatan militer yang efektif dalam menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal melalui kerja sama pertahanan.

Kerja sama pertahanan yang dilakukan pada tahun 2019 dengan Prancis menjadi bagian penting dari upaya strategis Indonesia dalam mencapai target *Minimum Essential Force* (MEF). Terpilihnya Prancis sebagai mitra kerja sama pertahanan, karena Prancis adalah salah satu negara yang diakui memiliki industri pertahanan yang maju, dengan teknologi tinggi dalam berbagai sektor militer, mulai dari sistem senjata, peralatan militer, hingga teknologi kapal perang dan pesawat tempur. Hubungan pertahanan kedua negara semakin erat melalui berbagai kesepakatan kerja sama yang melibatkan pengadaan alutsista, transfer teknologi, dan pelatihan militer. Prancis menawarkan tidak hanya penjualan alutsista, tetapi juga peningkatan kemampuan lokal melalui mekanisme *offset* dan *transfer teknologi*. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk tidak hanya menerima produk jadi, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam memproduksi dan merawat teknologi militer secara mandiri di masa depan.

Sementara itu, Prancis menilai jika kerjasama dengan Indonesia tidak hanya memajukan agenda perdagangan senjata dan teknologi militernya, tetapi juga

memperkuat pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara. Prancis berusaha memperluas jangkauannya dalam perjanjian pertahanan yang mencakup pelatihan, konsultasi keamanan, dan pertukaran intelijen, yang semuanya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Prancis, memiliki kepentingan besar di kawasan Indo-Pasifik, terutama karena wilayah-wilayah seberang lautnya (*overseas territories*) seperti Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru. Kehadiran Prancis di kawasan ini membuatnya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik, terutama terkait kebebasan navigasi dan perdagangan di perairan internasional. Karena itulah, Prancis melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat penting dalam mempertahankan keteraturan dan stabilitas di wilayah tersebut (France Diplomatie, 2018).

Sehubungan dengan terjalannya kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis dalam memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Tahun 2019, terdapat beberapa literatur yang dapat di jadikan sebagai rujukan, seperti penelitian Alex Firmansyah Rahaman, Syaiful Anwar dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari (2015) yang menjelaskan *Minimum Essential Force* (MEF) dilakukan melalui pembangunan *cyber defense* dan lebih fokus pada upaya pemenuhan modernisasi alat utama sistem senjata pada konteks *Revolution in Military Affairs* (RMA) bagi Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan penelitian dari Muhammad Rizky Amrullah (2016) menjelaskan praktik diplomasi pertahanan Indonesia berupa kerjasama pertahanan dengan Turki dalam bidang industri pertahanan yang terfokus pada pengembangan senjata. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan di tujuan untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam tentang efektivitas atas kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Prancis dalam memenuhi *Minimum Essential Force*.

KERANGKA ANALITIK

1. Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi politik dan filosofi yang berfokus pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang terbatas. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari konsep liberalisme:

- a. Kebebasan Individu, Individu dianggap memiliki kebebasan dasar yang tidak boleh dilanggar oleh negara, seperti kebebasan berpikir, berbicara, dan memilih. Setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri sepanjang tidak merugikan hak orang lain.
 - b. Pemerintahan Terbatas, Pemerintah harus dibatasi kekuasaannya melalui konstitusi dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kebebasan warga negara. Negara berfungsi melindungi hak-hak individu, bukan mengontrol setiap aspek kehidupan.
 - c. Hak Asasi Manusia, Liberalisme sangat menekankan pada perlindungan hak-hak dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik pribadi. Hak-hak ini dianggap universal dan harus dijamin oleh pemerintah.
 - d. Pasar Bebas, Dalam ekonomi, liberalisme mendorong adanya kebebasan pasar, dengan intervensi pemerintah yang minimal. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasar yang bebas akan menciptakan efisiensi dan kesejahteraan yang lebih baik.
 - e. Demokrasi dan Partisipasi Politik, Liberalisme mendukung sistem demokrasi di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, transparansi, dan akuntabilitas juga ditekankan.
 - f. Kesenjangan Hukum, Semua individu dianggap setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam sistem hukum. Liberalisme memiliki varian yang berbeda, seperti liberalisme klasik yang lebih mengutamakan kebebasan ekonomi dan individu serta liberalisme sosial yang menekankan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan mengatasi ketimpangan ekonomi.
2. Kerjasama Internasional
- Kerjasama internasional awalnya terjadi dikarenakan adanya berbagai macam masalah nasional, regional, maupun global yang muncul sehingga memerlukan perhatian tidak hanya dari satu negara, lalu kemudian setiap negara masing-masing melakukan

pendekatan dengan membawa saran atau usul untuk penanggulangan masalah, melakukan negosiasi atau tawar-menawar, melakukan perundingan, menyimpulkan bukti-bukti yang terkumpulkan untuk membenarkan salah satu usul yang telah diberikan, dan setelah itu diakhiri dengan suatu perjanjian yang pada akhirnya memuaskan semua pihak (Holsti, 1998). Lebih lanjut, di jelaskan bahwa kerjasama internasional terbagi dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama atau perjanjian yang dibuat dan dilakukan oleh dua negara saja untuk mengatur kepentingan dari kedua belah pihak.

b. Kerjasama Regional

Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara dalam satu kawasan.

c. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral merupakan perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di luar batasan dari suatu kawasan tertentu.

3. Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan diartikan sebagai hubungan yang bertujuan untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu dalam pengembangan kekuatan yang bertanggung jawab, kompeten dan demokratis (UK Ministry of Defence, 2014). Pada dasarnya, dalam diplomasi pertahanan terdapat tiga varian utama, yang meliputi *Defense Diplomacy for Confident Building Measures*, *Defense Diplomacy for Defense Capabilities* dan *Defense Diplomacy for Defense Industry*. Varian yang digunakan dalam kerjasama Indonesia dan Perancis adalah *Defense Diplomacy for Defense Industry*, dimana diplomasi dilaksanakan dengan tujuan membangun dan memperkuat industri pertahanan suatu negara.

4. *Minimum Essential Force*

Kebijakan *Minimum Essential Forces* sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Terdapat sejumlah aspek yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan MEF, di antaranya peningkatan profesionalitas TNI, pembaruan alutsista, dan pengembangan industri

pertahanan. Pelaksanaan MEF dilaksanakan dalam tiga periode: 2010 hingga 2014, 2015 hingga 2019, dan 2019 hingga 2024 di mana evaluasi dan penyelarasan kebijakan diadakan setiap dua tahun (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena. Pada metode ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui literatur seperti skripsi, buku, jurnal dan laporan. Sedangkan untuk analisis data dilakukan melalui reduksi data dan penyajian data.

PEMBAHASAN

Efektivitas kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis dalam memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) pada tahun 2019 di tinjau dari beberapa aspek, seperti pengadaan alutsista strategis, transfer teknologi, serta hubungan geopolitik dan diplomatik, yang semuanya harus dianalisis untuk menilai efektivitasnya secara komprehensif. MEF adalah program jangka panjang Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekuatan pertahanan negara cukup kuat dalam menghadapi berbagai ancaman. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah modernisasi alutsista, mengingat sebagian besar peralatan militer Indonesia yang sudah tua dan tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan modern (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Kerjasama dengan Prancis, terutama dalam pengadaan alutsista seperti Dassault Rafale dan kapal selam Scorpène, berkontribusi signifikan terhadap upaya modernisasi ini. Rafale merupakan pesawat tempur multirole generasi 4.5 yang memiliki keunggulan teknologi dalam hal misi udara ke udara, udara ke darat, dan udara ke laut. Dengan pengadaan Rafale, TNI AU memiliki peningkatan signifikan dalam kemampuan tempur dan kecepatan respons. Selain itu, kapal selam Scorpène yang ditawarkan Prancis merupakan kapal selam diesel-listrik yang dilengkapi dengan teknologi siluman (*stealth*), yang sangat penting bagi Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna dan Selat Malaka. Kemampuan ini

memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia, terutama dalam menghadapi potensi ancaman di perairan sengketa. Namun, meskipun pengadaan alutsista dari Prancis memberikan dampak positif bagi modernisasi pertahanan Indonesia, tantangan masih ada dalam hal implementasi dan waktu pengiriman. Proses pengadaan pesawat tempur dan kapal selam membutuhkan waktu yang lama, mulai dari negosiasi, kontrak, hingga produksi dan pengiriman. Karena itu, efektivitas kerja sama ini dalam memenuhi target MEF jangka pendek mungkin masih terbatas, namun jangka panjangnya memberikan manfaat signifikan (Indo Militer, 2017).

Salah satu aspek penting dari kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis adalah transfer teknologi (ToT). Transfer teknologi tidak hanya sebatas pengiriman peralatan militer, tetapi juga melibatkan peningkatan kemampuan lokal melalui pelatihan dan keterlibatan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. ToT ini merupakan mekanisme yang sangat penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai kemandirian pertahanan dalam jangka panjang. Kerjasama dalam pengadaan pesawat Rafale dan kapal selam Scorpène mencakup komponen transfer teknologi, di mana teknisi Indonesia dilatih untuk dapat melakukan perawatan, perbaikan, dan bahkan produksi komponen tertentu. Ini meningkatkan kapasitas industri pertahanan Indonesia yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing (Fleurant et al, 2018).

Namun, efektivitas dari transfer teknologi ini sangat bergantung pada pelaksanaan dan implementasi di lapangan. Jika transfer teknologi ini dilakukan dengan baik, Indonesia akan mendapatkan keuntungan jangka panjang dalam bentuk pengembangan kemampuan teknologi pertahanan domestik. Sebaliknya, jika proses ini hanya bersifat formalitas atau kurang optimal, maka transfer teknologi tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Dalam konteks ini, pengalaman sebelumnya dengan kerjasama internasional menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan program transfer teknologi, terutama dalam memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan dan berkembang di masa mendatang.

Selain manfaat dalam bidang pengadaan alutsista dan transfer teknologi, kerja sama pertahanan ini juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah geopolitik regional. Kawasan Indo-Pasifik adalah salah satu wilayah paling dinamis di dunia, dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan serta persaingan pengaruh antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Kerja sama dengan Prancis, yang merupakan kekuatan besar Eropa dengan kepentingan strategis di Indo-Pasifik, memberikan Indonesia keuntungan tambahan. Prancis memiliki kepentingan di kawasan melalui wilayah seberang lautnya, dan memiliki posisi yang kuat dalam kebijakan maritim internasional, termasuk kebebasan navigasi. Dengan menjalin hubungan pertahanan yang kuat dengan Prancis, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemain utama di kawasan yang mendukung stabilitas dan keamanan. Prancis, di sisi lain, melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, yang berperan penting dalam menjaga keamanan di jalur perdagangan utama dunia. Hubungan ini memberikan peluang bagi kedua negara untuk saling memperkuat posisi mereka dalam konteks diplomasi pertahanan dan geopolitik (Rohman, 2016).

Meskipun ada banyak manfaat dari kerja sama pertahanan ini, efektivitasnya tidak terlepas dari sejumlah tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Masalah birokrasi dan regulasi: Proses pengadaan alutsista di Indonesia sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan kompleks. Hal ini dapat memperlambat pelaksanaan kesepakatan, baik dalam hal pengiriman alutsista maupun pelaksanaan transfer teknologi.
2. Ketergantungan pada anggaran pertahanan: Efektivitas kerja sama juga bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mendanai proyek-proyek modernisasi alutsista. Jika anggaran pertahanan terbatas, maka proses modernisasi dapat terhambat dan tidak berjalan sesuai rencana.
3. Kompatibilitas dan integrasi: Pengadaan alutsista dari berbagai negara, termasuk Prancis, menimbulkan tantangan dalam hal kompatibilitas sistem. Misalnya, pengintegrasian pesawat Rafale dengan sistem yang ada membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan.

4. Keterbatasan kapasitas industri dalam negeri: Meskipun transfer teknologi menjadi bagian penting dari kerjasama, industri pertahanan dalam negeri masih memiliki keterbatasan dalam hal teknologi dan sumber daya manusia. Kapasitas industri dalam negeri untuk menyerap teknologi baru harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar manfaat dari ToT dapat terwujud sepenuhnya.

Secara keseluruhan, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis memberikan manfaat signifikan dalam upaya mencapai target MEF. Dari segi modernisasi alutsista, pengadaan pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpène meningkatkan kemampuan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman modern. Transfer teknologi yang disertakan dalam kerjasama juga memberikan peluang bagi pengembangan industri pertahanan domestik. Namun, efektivitas penuh dari kerja sama ini masih bergantung pada berbagai faktor, seperti implementasi yang tepat, kapasitas industri dalam negeri, dan keberlanjutan komitmen kedua belah pihak. Dalam jangka pendek, tantangan seperti waktu pengiriman dan hambatan birokrasi mungkin membatasi dampaknya, namun dalam jangka panjang, manfaat dari transfer teknologi dan peningkatan kapasitas pertahanan domestik akan berkontribusi pada kemandirian pertahanan Indonesia. Dari perspektif geopolitik, kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta memperdalam hubungan diplomatik dengan Prancis. Dengan penguatan hubungan strategis ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan manfaat militer, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam menjaga stabilitas kawasan.

KESIMPULAN

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis dalam memenuhi target *Minimum Essential Force* (MEF) memberikan kontribusi penting dalam beberapa aspek strategis bagi Indonesia. Dari sisi modernisasi alutsista, pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale dan kapal selam Scorpène secara signifikan meningkatkan kapasitas tempur dan pertahanan maritim Indonesia, memperkuat postur pertahanan negara dalam menghadapi ancaman modern. Selain itu, transfer teknologi yang disertakan dalam kerjasama ini memberikan peluang bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri, yang sejalan dengan upaya Indonesia untuk mencapai kemandirian pertahanan. Meskipun

terdapat tantangan dalam hal implementasi dan penguatan kapasitas industri domestik, kerjasama ini menawarkan manfaat jangka panjang yang dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Dari perspektif geopolitik, kerja sama ini memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis, meningkatkan posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Prancis, sebagai kekuatan besar di Eropa dengan kepentingan di kawasan ini, melihat Indonesia sebagai mitra kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan, kerjasama ini efektif dalam membantu Indonesia mencapai sebagian besar tujuan MEF, dengan potensi manfaat jangka panjang yang akan terus mendukung modernisasi pertahanan dan pengembangan kemampuan industri dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pertahanan RI. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta: Kementerian Perahanan Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2012). Pengaturan Teknis Tentang Kerjasama Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Menteri Pertahanan dan Urusan Veteran Republik Perancis. Perancis: Kementerian Pertahanan RI.
- France Diplomatie. (2018). France and Indonesia Bilateral Relations.
- Alex Firmansyah Rahaman, Syaiful Anwar dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari (2015) Analisis Minimum Essential Force (MEF) Dalam Rangka Pembangunan Cyber-Defense
- Muhammad Rizky Amrullah (2016) Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki : Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan
- Holsti, K. J. (1988). Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). Minimum Essential Force TNI 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). Minutes of Meeting of 3rd Indonesia – France Defence Dialogue. Jakarta: Kemhan RI.
- Indo Militer. (2015, April 20). AS565 MBe Panther TNI AL Akan Dibekali Teknologi HELRAS DS-100 Dan Peluncur Torpedo. Retrieved from Indomiliter.com:

<https://www.indomiliter.com/as565-mbe-panther-tni-alakan-dibekali-teknologi-helras-ds-100-dan-peluncur-torpedo/IndoMiliter> (2015, Agustus 26). Elang Recon Vehicle 4×4: Rantis Intai Merek Dalam Negeri Citarasa Perancis. Retrieved from Indomiliter.com: <https://www.indomiliter.com/elang-recon-vehicle-4x4-rantis-intaimerekdalam-negeri-citarasa-perancis/>

Fleurant, A., Kuimova, A., Tian, N., Wezeman, P. D., & Wezeman, S. T. (2018, December). The SIPRI Top 100 Arms Producing and Military Services Companies 2017. Retrieved from SIPRI.org: www.sipri.org/sites/default/files/201812/fs_arms_industry_2017_0

Rohman. (2016). Airbus Helicopters Kirim Tiga Unit Pertama AS565 MBe Panther ke Indonesia. Retrieved from Jakarta Greater: <https://jakartagreater.com/airbus-helicopters-kirim-tiga-unit-pertamaas565-mbe-panther-ke-indonesia/>